

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama Penelitian ini dilakukan oleh Aulia Anisa dan Dewi Setyowati 2019, dengan judul *Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara*, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor dan menganalisis upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1233 Kepala Keluarga di Desa Tempur dengan sampel 92 KK. Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah test, angket, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskripsi dan distribusi frekuensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat dibedakan berdasarkan kapasitas mitigasi, kapasitas kesiapan, dan kapasitas bertahan hidup. Kapasitas mitigasi di Desa Tempur cenderung cukup baik dengan rata-rata persentase 70,21%. Kapasitas terhadap kesiapan cenderung ke sikap sangat setuju dalam menghadapi bencana tanah longsor dengan rata-rata persentase 54%. Sedangkan kapasitas bertahan hidup dibedakan berdasarkan strategi adaptasi ekonomi, sosial, struktural, dan kultural. Pada Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara memiliki persamaan yaitu tema upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan di Desa Tempur.

Kedua Penelitian yang dilakukan Gayatri Widya Indryani, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi 2022, dengan judul *Implementasi Program Inovasi Mitigasi Bencana Titip Bandaku Di Kabupaten Klaten*. Menjelaskan proses pelaksanaan

dan mengetahui keberhasilan implementasi program inovasi mitigasi bencana yang dilakukan Kabupaten Klaten melalui Program Titip Bandaku. Kabupaten Klaten sebagai daerah rawan bencana yang memiliki berbagai potensi bencana memerlukan adanya mitigasi bencana yang salah satunya berupa inovasi Program Titip Bandaku. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan inovasi Titip Bandaku saat ini baru diterapkan di kawasan rawan bencana Merapi III. Sasaran dari adanya inovasi Titip Bandaku ini dapat diterapkan di seluruh kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Klaten. Implementasi Program Titip Bandaku telah berhasil diimplementasikan di Kawasan rawan bencana III Merapi dengan menunjukkan kesesuaian pada tiga aspek menggunakan teori Kesesuaian David C. Korten. Keberhasilan implementasi Program Titip Bandaku tersebut menunjukkan adanya ketercapaian tujuan program yaitu untuk penyelamatan arsip penting milik masyarakat di Kawasan Rawan Bencana. Persamaan : pada penelitian yang dilakukan di Kabupaten Klaten dengan implementasi program inovasi bencana dengan implementasi program pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Banyumas adalah melakukan implementasi bencana antar stakeholder. Perbedaan pendekatan analisis deskriptif kualitatif

Ketiga Penelitian yang dilakukan Ahmad Buchar 2020, Dengan judul *Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat* di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia, Menginisiasi terbentuknya tujuan dari penelitian ini adakah Forum Penanggulangan Bencana (FRB) dalam Desa Tangguh Bencana sebagai langkah awal dalam menyusun perencanaan penanggulangan yang efektif Melalui perencanaan ditingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur pengambil kepentingan serta dukungan kebijakan kegiatan mitigasi bencana sangat bermamfaat bagi warga desa yang rentan dengan bencana. Kelembagaan yang dibentuk di Desa berguna untuk mengorganisir warga untuk semakin meningkatkan kepedulian dan rasa sosial

yang tinggi. Sedangkan pengembangan kapasitas adalah bentuk melatih sumberdaya desa untuk menjadi relawan yang bergerak dan fokus pada tugas kerelawanan dan kebencanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan tanggapbencana belum optimal diberikan kesemua warga, dan masih sebatas kepada relawan yang dibentuk di masing- masing RT/RW, hal tersebut dikarenakan keterbatasandukungan anggaran dari lembaga kebencanaan maupun dari pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. Perbedaan pada penelitian ini tema desa tangguh bencana dengan meningkatkan rasa kepedulian sosial memaksimalkan desa tangguh bencana dengan kelembagaan dan pengembangan kapasitas baik relawan kebencanaan.

Keempat Penelitian yang dilakukan Sheikh Kamran Abid dkk 2021, dengan judul *Toward an Integrated Disaster Management Approach: How Artificial Intelligence Can Boost Disaster Management* (Menuju Pendekatan Penanggulangan Bencana Terpadu: Bagaimana Kecerdasan Buatan Dapat Meningkatkan Penanggulangan Bencana). Penelitian ini memberikan tinjauan pustaka untuk mengkaji peran aplikasi kecerdasan buatan (AI) dan melihat bagaimana AI dapat meningkatkan manajemen bencana dan mengembangkan informasi pragmatis untuk mencapai tujuan studi. Dengan metode kuantitatif dan kualitatif dan strategi analisis data. Studi ini memberikan gambaran umum tentang aplikasi AI saat ini dalam manajemen bencana selama empat fasenya dan bagaimana AI sangat penting untuk semua fase manajemen bencana, yang mengarah ke respons yang lebih cepat, lebih ringkas, dan lengkap. Mengintegrasikan sistem informasi geografis (GIS) dan penginderaan jauh (RS) ke dalam manajemen bencana memungkinkan perencanaan, analisis, kesadaran situasional, dan operasi pemulihan yang lebih tinggi. GIS dan RS umumnya diakui sebagai alat pendukung utama untuk manajemen bencana. Kemampuan visualisasi, citra satelit, dan analisis kecerdasan buatan dapat membantu pemerintah dalam membuat keputusan cepat setelah bencana alam. Persamaan

dengan penelitian saya pemerintah dapat membuat keputusan yang cepat cerdas setelah bencana alam.

Kelima Penelitian yang dilakukan Cameron Atkinson and Steven Curnin 2020, *Sharing responsibility in disaster management policy*. Bertujuan konsep normalisasi untuk menciptakan subjek yang mahir dalam manajemen bencana, biopower dan biopolitik bagaimana kebijakan dianalisis, yang dibingkai pada taksonomi kewajiban yang dikembangkan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis frekuensi kata yang didasarkan pada konsep tanggung jawab bersama. Dan berusaha mengungkap tanggung jawab pemerintah dan individu dalam kebijakan manajemen bencana Australia. Dalam menganalisis SFDRR. Persamaan penelitian ini adalah pemerintah berusaha membuat kebijakan pengurangan bencana alam.

Keenam Roni Ekha Putera, Tengku Rika Valentina, Siti Annisa Silvia Rosa 2020, *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Padang*. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya-upaya kebijakan yang dilakukan oleh Kota Padang dalam penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan dengan menggunakan purposive sampling, data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder dari dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan ruang di Kota Padang yang didasarkan pada perda No. 4 Tahun 2012 telah memperhatikan daerah rawan bencana, terlihat dari adanya pengkategorian daerah rawan bencana di Kota Padang. Namun masih terdapat daerah rawan bencana yang masih menyalahi aturan pembangunan. Untuk itu, pemerintah Kota Padang perlu memperhatikan rekomendasi izin mendirikan bangunan terutama di daerah-daerah yang rawan bencana dari instansi-instansi yang terkait, Persamaan pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam pengurangan bencana alam.

Ketujuh penelitian yang dilakukan oleh Nahot Tua Parlindungan Sihalohe Universitas 2022, *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Medan*, Bertujuan menganalisis *collaborative governance* yang dilaksanakan Pemerintah Kota Medan dalam menangani banjir dengan mengacu masalah pokok: bagaimana seharusnya Pemerintah Kota Medan menjalankan *collaborative governance* yang memadai. Penelitian ini membuktikan bahwa ada aspek-aspek prioritas yang khas dalam penanganan banjir di Medan. Aspek-aspek prioritas tersebut kemudian perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan *collaborative governance* dalam berbagai bentuk kerja sama dengan berbagai aktor. Namun demikian, harus diakui bahwa tidak ada satu kebijakan pun yang bisa memfasilitasi pemecahan masalah banjir secara sempurna.

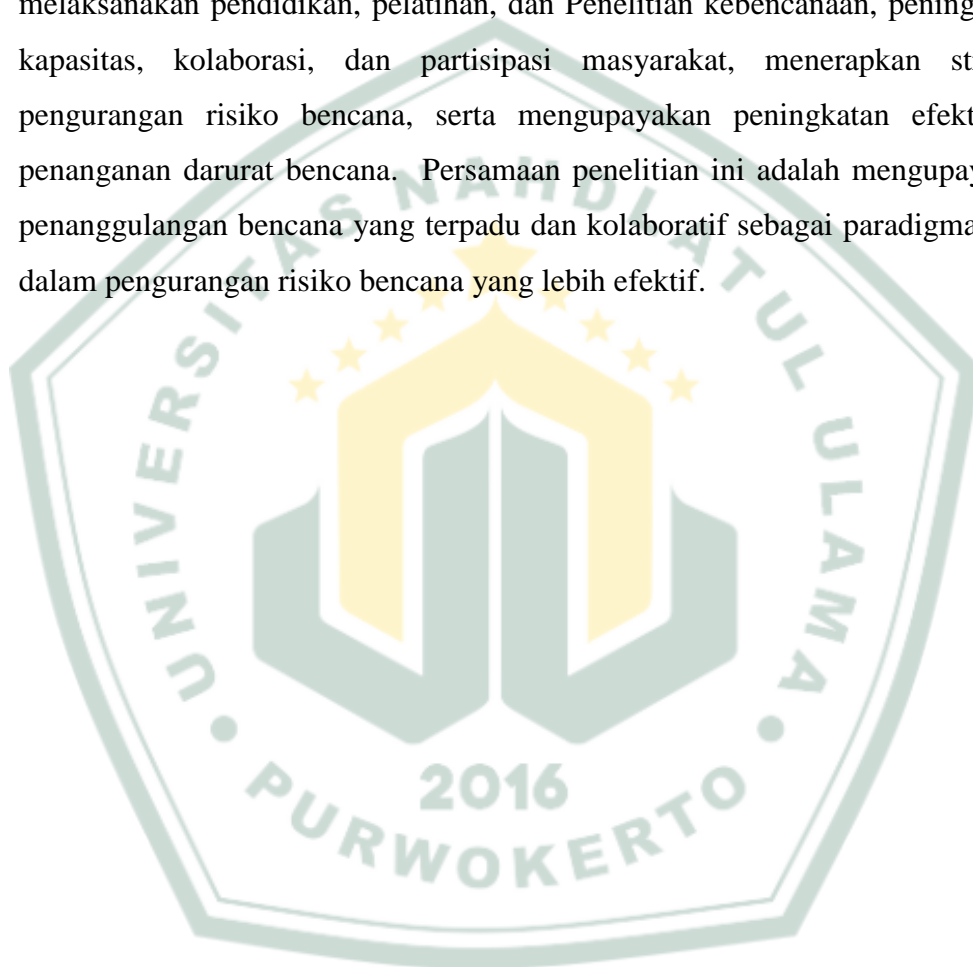
Kedelapan penelitian yang dilakukan Siti Nur Hidayatush Sholikah 2021 *Analisis Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana masyarakat Desa Banaran dalam menghadapi bencana tanah longsor. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner serta analisis data dilakukan berdasarkan indeks kesiapsiagaan yang dikembangkan oleh LIPI-UNESCO Tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di Desa Banaran berada dalam kategori siap. Dimana dalam aspek kesiapsiagaan pengetahuan dan sikap (knowledge and attitude) dengan presentasi 90,06% dalam kategori sangat siap, perencanaan tanggap darurat (emergency planning) dengan presentasi 96,19% dalam kategori sangat siap, sistem peringatan (warning system) dengan presentasi 93,91 dalam kategori sangat siap dan mobilitas sumberdaya (resources mobilization capacity) dengan presentasi 88,40 % dalam kategori sangat siap. Sedangkan mitigasi struktural dengan presentasi 67,09 % dalam kategori siap dan mitigasi bencana non struktural dengan presentasi 80,74 dalam kategori sangat siap. Persamaan penelitian ini adalah penerapan kesiapsiagaan pada masyarakat saat bencana alam.

Kesembilan Penelitian yang dilakukan Dinda Farras Haniya, Irvinne Alma Dhita 2021, *Upaya Pemerintah Dalam Menangani Bencana Alam Tanah Longsor (Studi Kasus di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang)*. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penyebab bencana tanah longsor serta mengidentifikasi dan menganalisis upaya pemerintah dalam menangani bencana tanah longsor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data yang berasal dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa longsor yang terjadi di Desa Cihanjuang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, lereng yang curam, sistem drainase yang buruk dan kurangnya vegetasi. Namun, pemerintah sudah memiliki beberapa upaya yang harus dilakukan, antara lain pascabencana jangka panjang, jangka pendek, dan mitigasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka rekomendasi untuk masalah ini adalah meningkatkan kesadaran dan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan mitigasi dan memantau kebijakan yang telah dibuat. Persamaan penelitian ini adalah mengetahui penyebab bencana tanah longsor serta mengidentifikasi dan menganalisis upaya pemerintah dalam menangani bencana tanah longsor.

Kesepuluh Haeril, Taufik Irfadat, Mas'ud 2022, *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Di Kabupaten Bima*. Tujuan strategi penanggulangan bencana diatas muaranya adalah untuk mengupayakan penanggulangan bencana yang terpadu dan kolaboratif sebagai paradigma baru dalam pengurangan risiko bencana yang lebih efektif di Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini dipilih melalui teknik nonprobability sampling, dengan menggunakan teknik purposive sampling atau teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan aspek tertentu.

Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi observation, wawancara dan dokumentasi. Sebagai leading sector dalam upaya penanggulangan bencana, BPBD bertindak sebagai koordinator, fasilitator, motivator, sekaligus pelaksana

program-program untuk mengurangi risiko bencana, menurunkan kerentanan, serta meningkatkan kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Bima. Adapun strategi yang diterapkan guna mengurangi resiko bencana di Kabupaen Bima yaitu dengan memperkuat aturan dan kapasitas kelembagaan, perencanaan penanggulangan bencana terpadu, melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan Penelitian kebencanaan, peningkatan kapasitas, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat, menerapkan strategi pengurangan risiko bencana, serta mengupayakan peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana. Persamaan penelitian ini adalah mengupayakan penanggulangan bencana yang terpadu dan kolaboratif sebagai paradigma baru dalam pengurangan risiko bencana yang lebih efektif.



Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu

| No | Penulis dan Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Teori dan Metode penelitian | Hasil penelitian | Perbedaan/persamaan |
|----|--|---|---|---|---|
| 1. | Aulia Anisa dan Dewi Setyowati 2019, Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang (Annisa & Setyowati, 2019). | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor dan menganalisis upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. | Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah test, angket, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskripsi dan distribusi frekuensi. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat dibedakan berdasarkan kapasitas mitigasi, kapasitas kesiapan, dan kapasitas bertahan hidup. Kapasitas mitigasi di Desa Tempur cenderung cukup baik dengan rata-rata persentase 70,21%. Kapasitas terhadap kesiapan cenderung ke sikap sangat setuju dalam menghadapi bencana tanah longsor dengan rata-rata persentase 54%. Sedangkan kapasitas bertahan hidup dibedakan berdasarkan strategi adaptasi ekonomi, sosial, struktural, dan kultural. | Persamaan : mengambil tema bencana alam Perbedaan : penelitian ini menggunakan teknik analisis deskripsi dan distribusi frekuensi. |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 2. Gayatri Widya Indryani, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi 2022, Implementasi Program Inovasi Mitigasi Bencana Titip Bandaku Di Kabupaten Klaten | Menjelaskan proses pelaksanaan dan mengetahui keberhasilan implementasi program inovasi mitigasi bencana yang dilakukan Kabupaten Klaten melalui Program Titip Bandaku. Kabupaten Klaten sebagai daerah rawan bencana yang memiliki berbagai potensi bencana. memerlukan adanya mitigasi bencana yang salah satunya berupa inovasi Program Titip Bandaku. | Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. | Pelaksanaan inovasi Titip Bandaku saat ini baru diterapkan di kawasan rawan bencana Merapi III. Sasaran dari adanya inovasi Titip Bandaku ini dapat diterapkan di seluruh kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Klaten. Implementasi Program Titip Bandaku telah berhasil diimplementasikan di Kawasan rawan bencana III Merapi dengan menunjukkan kesesuaian pada tiga aspek menggunakan teori Kesesuaian David C. Korten. Keberhasilan implementasi Program Titip Bandaku tersebut menunjukkan adanya ketercapaian tujuan program yaitu untuk penyelamatan arsip penting milik masyarakat di Kawasan Rawan Bencana. | Persamaan : pada penelitian yang dilakukan di Kabupaten Klaten dengan implementasi program inovasi bencana dengan implementasi program pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Banyumas adalan melakukan implementasi bencana antar <i>stakeholder</i> . Perbedaan : pendekatan analisis deskriptif kualitatif. |
|---|---|--|---|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 3. Ahmad Buchar 2020, Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia, (Buchari, 2020). | Menginisiasi terbentuknya Forum Penanggulangan Bencana (FRB) dalam Desa Tangguh Bencana sebagai langkah awal dalam menyusun perencanaan penanggulangan yang efektif. | Penelitian ini menggunakan teori manajemen bencana, Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif. | Menginisiasi terbentuknya Forum Penanggulangan Bencana (FRB) dalam Desa Tangguh Bencana sebagai langkah awal dalam menyusun perencanaan penanggulangan yang efektif. Destana dianggap dapat meningkatkan partisipasi warga masyarakat akan kepekaan dan kepedulian akan bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Garut. | Persamaan : dari penelitian ini adalah teori menggunakan manajemen bencana dan terbentuknya Forum Penanggulangan Bencana FRB Perbedaan : pendekatan deksriptif kualitatif. |
| 4. Sheikh Kamran Abid dkk 2021, Tinjauan pustaka kuantitatif dan strategi analisis data Toward an untuk mengkaji analisis data Integrated Disaster peran aplikasi Management kecerdasan buatan Approach: How (AI) dan melihat Artificial bagaimana AI Intelligence Can dapat Boost Disaster meningkatkan | | | Studi ini memberikan gambaran umum tentang aplikasi AI saat ini dalam manajemen bencana selama empat fasenya dan bagaimana AI sangat penting untuk semua fase manajemen bencana, yang mengarah ke respons yang lebih cepat, | Persamaan dengan penelitian saya pemerintah dapat membuat keputusan yang cepat cerdas setelah bencana alam Perbedaan : menggunakan |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Management. (Abid dkk., 2021) | manajemen bencana dan mengembangkan informasi pragmatis untuk mencapai tujuan studi | lebih ringkas, dan lengkap. Mengintegrasikan sistem informasi geografis (GIS) dan penginderaan jauh (RS) ke dalam manajemen bencana memungkinkan perencanaan, analisis, kesadaran situasional, dan operasi pemulihan yang lebih tinggi. GIS dan RS umumnya diakui sebagai alat pendukung utama untuk manajemen bencana. Kemampuan visualisasi, citra satelit, dan analisis kecerdasan buatan dapat membantu pemerintah dalam membuat keputusan cepat setelah bencana alam. | aplikasi cerdas buatan |
| 5. Cameron Atkinson and Steven Curnin 2020, sharing responsibility in disaster management policy. (Atkinson & Curnin, 2020) | Bertujuan konsep normalisasi untuk menciptakan artikel ini melibatkan subjek yang mahir dalam manajemen bencana, biopower dan biopolitik , bagaimana kebijakan dianalisis. yang | Metodologi yang diadopsi dalam artikel ini melibatkan analisis frekuensi kata yang didasarkan pada konsep tanggung jawab bersama | Artikel ini berusaha mengungkap tanggung jawab pemerintah dan individu dalam kebijakan manajemen bencana Australia. Dalam menganalisis SFDRR Persamaan : mengambil tema manajemen bencana Perbedaan : menggunakan analisis frekuensi kata yang didasarkan pada konsep |

| | | dibingkai pada taksonomi kewajiban yang dikembangkan | | | | tanggungjawab bersama |
|----|---|--|---|--|---|--------------------------|
| 6. | Roni Ekha Putera, Tengku Rika Valentina, Siti Annisa Silvia Rosa 2020, Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Padang (Putera dkk., 2020). | Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya-upaya kebijakan yang dilakukan oleh Kota Padang dalam penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana. | Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan dengan menggunakan purposive sampling, data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder dari dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan model interaktif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan ruang di Kota Padang yang didasarkan pada perda No. 4 Tahun 2012 telah memperhatikan daerah rawan bencana, terlihat dari adanya pengkategorian daerah rawan bencana di Kota Padang. Namun masih terdapat daerah rawan bencana yang masih menyalahi aturan pembangunan. Untuk itu, pemerintah Kota padang perlu memperhatikan rekomendasi izin mendirikan bangunan terutama di daerah-daerah yang rawan bencana dari instansi-instansi yang terkait | Persamaan pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam pengurangan bencana alam. | |
| 7. | Nahot Parlindungan Sihalohe Universitas 2022, | Tua Bertujuan menganalisis <i>collaborative governance</i> yang | Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, dalam | Penelitian ini membuktikan bahwa ada aspek-aspek prioritas yang khas dalam penanganan banjir di Medan. | Persamaan penelitian ini pelaksanaan <i>collaborative</i> | ini |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|
| | <i>Collaborative Governance</i> Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Medan (Sihaloho, 2022) | dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan menangani banjir dengan mengacu lima masalah pokok: bagaimana seharusnya Pemerintah Kota Medan menjalankan collaborative governance yang memadai | desain penelitian literature review. Literatur online dari database lima akademis, meliputi Google Scholar, Research Gate, Doaj, Springer Link, dan Science Direct | Aspek-aspek prioritas tersebut kemudian perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan <i>collaborative governance</i> dalam berbagai bentuk kerja sama dengan berbagai aktor. Namun demikian, harus diakui bahwa tidak ada satu kebijakan pun yang bisa memfasilitasi pemecahan masalah banjir secara sempurna. | <i>governance</i> dalam berbagai bentuk kerja sama dengan berbagai aktor. Perbedaan : menggunakan literature review dan literature himpunan |
| 8. | Siti Hidayatush Sholikah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia 2021, Analisis Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten | Nur Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana masyarakat Desa Banaran dalam menghadapi bencana tanah longsor | Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner analisis dilakukan berdasarkan indeks kesiapsiagaan yang dikembangkan oleh | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di Desa Banaran berada dalam kategori siap. Dimana dalam aspek kesiapsiagaan pengetahuan dan sikap (knowledge and attitude) dengan presentasi 90,06% dalam kategori sangat siap, perencanaan tanggap darurat (emergency planning) dengan presentasi 96,19% dalam kategori sangat siap, sistem | Persamaan penelitian ini adalah penerapan kesiapsiagaan pada masyarakat saat bencana alam. Perbedaan : menggunakan teori kuantitatif dengan pengumpulan kuisisioner |

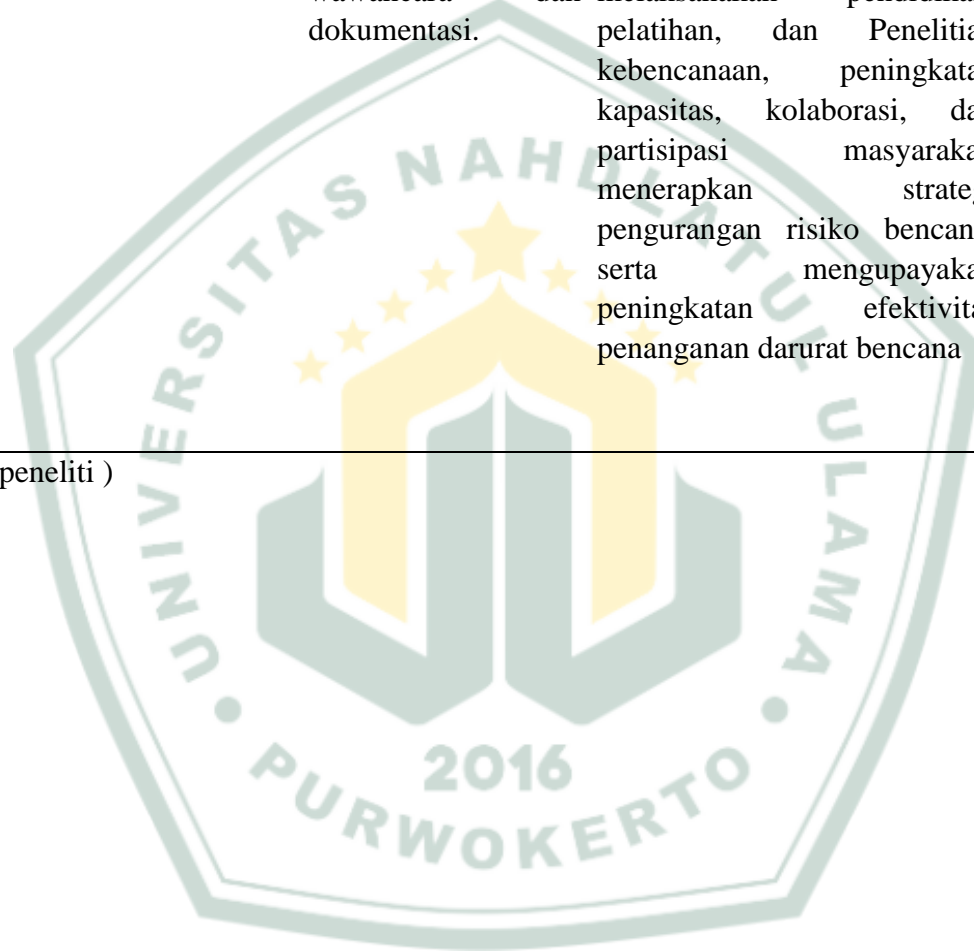
| | | |
|--|---|--|
| <p>Ponorogo (Hidayatush Sholikhah dkk., 2021)</p> | <p>LIPI-UNESCO Tahun 2006</p> | <p>peringatan (warning system) dengan presentasi 93,91 dalam kategori sangat siap dan mobilitas sumberdaya (resources mobilitation capacity) dengan presentasi 88,40 % dalam kategori sangat siap. Sedangkan mitigasi struktural dengan presentasi 67,09 % dalam kategori siap dan mitigasi bencana non struktural dengan presentasi 80,74 dalam kategori sangat siap.</p> <p>Kata</p> |
| <p>9. Dinda Farras Tujuan dari Penelitian ini penulisan ini menggunakan Alma Dhita 2021, adalah untuk metode penelitian Upaya Pemerintah mengetahui kualitatif deskriptif Dalam Menangani penyebab bencana dengan Bencana Alam tanah longsor serta menggunakan data Tanah Longsor mengidentifikasi yang berasal dari (Studi Kasus di dan menganalisis data sekunder. Desa Cihanjuang upaya pemerintah Kecamatan dalam menangani Cimanggung</p> | <p>ini Berdasarkan hasil penelitian Persamaan diketahui bahwa longsor yang penelitian ini adalah terjadi di Desa Cihanjuang dapat mengetahui disebabkan oleh curah hujan penyebab bencana yang tinggi, lereng yang curam, tanah longsor serta sistem drainase yang buruk dan mengidentifikasi dan kurangnya vegetasi. Namun, menganalisis upaya pemerintah sudah memiliki pemerintah dalam beberapa upaya yang harus menangani bencana dilakukan, antara lain tanah longsor. pascabencana jangka panjang,</p> | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Sumedang) (Haniya dkk., 2021) | bencana tanah longsor. | | jangka pendek, dan mitigasi. Perbedaan : Berdasarkan analisis yang telah menggunakan data dilakukan, maka rekomendasi skunder untuk masalah ini adalah meningkatkan kesadaran dan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan mitigasi dan memantau kebijakan yang telah dibuat |
| 10 Haeril, Taufik Irfadat, Mas'ud 2022, Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Di Kabupaten Bima (Haeril dkk., 2022) | Tujuan strategi Penelitian penanggulangan bencana diatas metode deskriptif muaranya adalah kualitatif. Subyek penelitian ini dipilih untuk mengupayakan melalui teknik penanggulangan nonprobability bencana yang sampling, dengan terpadu dan menggunakan teknik kolaboratif sebagai purposive sampling paradigma baru atau teknik dalam penentuan sampel pengurangan risiko dengan strategi yang diterapkan guna bencana yang lebih mempertimbangkan mengurangi resiko bencana di aspek tertentu. Kabupaten Bima. Teknik pengumpulan data terdiri atas kapasitas kelembagaan, observasi | Penelitian ini Sebagai leading sector dalam upaya penanggulangan bencana, BPBD bertindak sebagai koordinator, fasilitator, motivator, sekaligus pelaksana program-program untuk mengurangi risiko bencana, menurunkan kerentanan, serta meningkatkan kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Bima. Adapun strategi yang diterapkan guna mengurangi resiko bencana di Kabupaen Bima yaitu dengan memperkuat aturan dan kapasitas kelembagaan, perencanaan penanggulangan | Persamaan penelitian ini adalah mengupayakan penanggulangan bencana yang terpadu dan kolaboratif sebagai paradigma baru dalam pengurangan risiko bencana yang lebih efektif Perbedaan : menggunakan teknik nonprobability sampling dengan teknik sampling |

observation,
wawancara
dokumentasi.

dan bencana terpadu,
melaksanakan pendidikan,
pelatihan, dan Penelitian
kebencanaan, peningkatan
kapasitas, kolaborasi, dan
partisipasi masyarakat,
menerapkan strategi
pengurangan risiko bencana,
serta mengupayakan
peningkatan efektivitas
penanganan darurat bencana

Sumber : (Data diolah peneliti)



B.Kajian Teori

1. Manajemen Bencana

a. Pengertian Manajemen Bencana

Manajemen bencana adalah suatu proses yang dinamis,berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan. Manajemen bencana menurut Universitas British Columbia adalah suatu proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama (common value) untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat (partisipan) untuk menyusun rencana dan menghadapi bencana, baik bencana potensial maupun aktual.

b. Tujuan Manajemen bencana

- (1) Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk
- (2) mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana.
- (3) Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut.
- (4) Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan (Telles dkk., 2019).

c. Tahap penanggulangan bencana

(1) Tahapan Pra bencana

Peningkatan Mitigasi bencana, meliputi :

- a) Sosialisasi kebencanaan pada masyarakat;
- b) Pelayanan iklan layanan kebencanaan melalui elektronik, radio, website dan sosial media;
- c) Latihan dan simulasi kebencanaan;

- d) Penyusunan dokumentasi rekontijensi banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi;
- e) Menjalin kerjasama antar pemangku kepentingan dan stakeholder dalam penanggulangan bencana daerah;
- f) Kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama pemerintah daerah/kabupaten pada daerah perbatasan (Sekartaji dkk., n.d.).

(2) Tahap saat terjadi bencana (darurat bencana)

Peningkata sistem penanganan darurat dan evaluasi serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, meliputi :

- a) Penyediaan peralatan yang memadai
- b) Penyediaan logistic
- c) Peningkatan kompetensi daya manusia penanggulangan bencana.
- d) Menjalin kerjasama antar pemangku kepentingan dan stakeholder dalam penanggulangan bencana di daerah (Kinesik & 2020, 2020).

(3) Tahap pemulihan (setelah bencana)

- a) Upaya peningkatan rehabilitasi dan rekontruksi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.
- b) Upaya pemulihan kembali dampak bencana/paksa bencana
- c) Menjalin kerjasama antar pemangku kepentingan dan stakeholder dalam penanggulangan bencana di daerah (Buchari, 2020).

2. Tinjauan Tentang Bencana

a. Definisi Bencana

Bencana merupakan suatu musibah yang tidak dapat dihindari tetapi dapat dicegah dan dihadapi. Pengertian bencana adalah suatu

gangguan ekstrim fungsi dari suatu masyarakat yang menyebabkan kerugian sosial, material dan lingkungan yang meluas dan melebihi kemampuan masyarakat terdampak untuk mengatasi dengan hanya menggunakan sumber daya sendiri. Bencana dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sumber: <https://www.bnpb.go.id/> diakses pada tanggal 23/05/2023 pukul 22:35 WIB.

b. Jenis-Jenis Bencana

Bencana adalah perbuatan manusia ditujukan pada kejadian yang bukan merupakan bencana alam yang terjadi secara tiba-tiba atau dalam jangka waktu yang panjang. Bencana buatan manusia yang secara tiba-tiba terjadi meliputi runtuhnya struktur bangunan, dan tambang yang terjadi dengan sendirinya, tanpa ada paksaan dan pengaruh dari luar Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam maupun oleh ulah manusia.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain: Bahaya alam dan bahaya karena ulah manusia yang menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction* (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya 51 teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*) Kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur

serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana. Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang isinya:

(1) Bencana alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

(2) Bencana non alam

Bencana ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

(3) Bencana sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

c. **Dampak Bencana**

Dampak bencana merupakan akibat yang timbul setelah terjadinya bencana. Bencana mengakibatkan penderitaan, kematian, kerugian harta benda, kerusakan fisik dan korban jiwa gangguan kehidupan/ kegiatan normal, hilangnya mata pencaharian kebanyakan orang, pengaruh pada kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. selain itu bencana alam juga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. pada skala tertentu Bencana dapat melumpuhkan perekonomian dengan menghancurkan

infrastruktur, mengganggu jaringan komunikasi, wabah penyakit, gagal panen dan lain sebagainya, peristiwa bencana alam yang membawa berupa kerusakan fisik dan korban jiwa secara langsung dapat berakibat pada penurunan kinerja perekonomian wilayah.

Bencana alam juga membawa pengaruh negatif terhadap pembangunan dan dapat menyusutkan kapasitas produksi dalam skala besar yang berakibat pada kerugian financial. Bencana membutuhkan pemulihan, rehabilitasi dan rekontruksi agar kehidupan ekonomi kembali normal. Semua itu memiliki konsekuensi pembiayaan yang sering kali melebihi kemampuan ekonomi daerah yang dilanda bencana sehingga bagi negara-negara yang keuangannya terbatas akan berpotensi menambah hutang Negara. Sumber : <https://BPBD.bogorkab.go.id/bencana-dan-manajemen-bencana/> diakses tanggal 23/05/2023 pukul 22:36 WIB.

3. Tinjauan tentang Tanah Longsor

a. Pengertian Tanah longsor

Bencana Tanah Longsor Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, bencana merupakan rangkaian atau proses peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dampak psikologis dan korban jiwa manusia. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi pada daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi. bencana longsor adalah gerakan massa tanah atau batuan akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Longsor juga merupakan gerakan massa berupa tanah, batu, timbunan atau material campuran lainnya ketika gaya penahan longsornya lebih kecil dibandingkan gaya

pendorong di sepanjang bidang longsor kritis sumber: <https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana> diakses pada 22/05/2023 pukul 23:56 WIB.

b. Jenis-Jenis Tanah Longsor

Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan.

(1) Longsor Translasi

Longsor translasi merupakan longsor yang terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Jenis longsor ini paling banyak terjadi di Indonesia.

(2) Longsor rotasi

Longsor rotasi adalah pergerakan massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung, umumnya terjadi di wilayah perbukitan.

(3) Pergerakan blok

Pergerakan blok merupakan jenis longsor yang disebabkan oleh perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsor ini juga biasa dikenal dengan longsor translasi blok batu.

(4) Runtuhan batu

Longsor jenis ini terjadi karena adanya sejumlah batu dan material batu yang jatuh ke arah bawah dengan jumlah banyak, Umumnya terjadi pada lereng yang terjal terutama di daerah pantai.

(5) Rayapan tanah

Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Setelah waktu yang

cukup lama longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah.

(6) Aliran bahan rombakan

Longsor ini terjadi karena massa tanah bergerak didorong oleh air. Biasanya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter. Kecepatan longsor ini dipengaruhi oleh kemiringan tanah itu sendiri (Haniya dkk., 2021).

c. Faktor yang Mempengaruhi Tanah Longsor

Berikut adalah faktor penyebab terjadinya tanah longsor:

(1) Hujan

Tingginya curah hujan mengakibatkan saat musim kemarau rongga-rongga tanah akan retak dan mengalami kekeringan.

(2) Lereng yang terjal

Kondisi lereng yang terjal tidak berdasarkan analisis dampak lingkungan mengakibatkan tanah longsor

(3) Tanah yang kurang padat

Tanah yang kurang padat dan kurangnya akar kokoh pada pohon lebih mudah longsor

(4) Batuan yang kurang kokoh

Kondisi batuan yang lapuk dan lereng yang mengalami pergeseran

(5) Jenis tata lahan

Disekitar lahan ada tanah yang tidak cukup menopang karena kurangnya tata lahan

(6) Erosi tanah

Terjadinya pengikisan tanah oleh air yang menyebabkan erosi pada tanah

(7) Getaran

Bencana alam yang terjadi ketika ada gempa bumi

(8) Kegiatan tambang

Saat kegiatan pertambangan kurangnya kesadaran yang mementingkan kondisi alam.

4. Tinjauan tentang Penanggulangan Risiko Tanah Longsor

a. Tujuan Penanggulangan Bencana

Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi

- (1) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- (2) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- (3) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- (4) menghargai budaya lokal;
- (5) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- (6) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kederawanan; dan
- (7) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Prinsip-Prinsip Penanggulangan Bencana

- (1) Cepat
- (2) Tepat
- (3) Koordinasi dan keterpaduan
- (4) Berdaya guna dan berhasil guna
- (5) Transparansi dan akuntabilitas
- (6) Kemitraan
- (7) Pemberdayaan
- (8) Non diskriminatif dan

(9) Non proletisi

c. Unsur Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

1) Prabencana

Tahap pra bencana merupakan tahapan penting yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana secara maksimal yang meliputi langkah: Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Mitigasi. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara mengadakan simulasi evakuasi bencana diantaranya:

(1) Pencegahan

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Contoh kegiatan pencegahan diantaranya melarang pembakaran hutan dalam perladangan, melarang penambangan batu di daerah curam, melarang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya.

(2) Mitigasi bencana

Mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruangan; pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

(3) Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

(4) Peringatan dini

Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat (*accessible*), segera (*immediate*), tegas tidak membingungkan (*coherent*), bersifat resmi (*official*).

2) Saat Tanggap Darurat

(1) Tanggap darurat

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan . Ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian dan pemulihan sarana prasarana.

(2) Bantuan Darurat

Bantuan Daurat Ini merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan juga air bersih.

3) Pascabencana

(1) Pemulihan (*Recovery*)

Pemulihan adalah rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaab, prasarana dan sarana dengan melakukan upata rehabilitasi.

(2) Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

(3) Rekonstruksi (*reconstruction*)

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

5. Tinjauan tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

a) Pengertian Badan Penanggulan Bencana daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Klasifikasi B) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas terdiri :

1. Kepala;

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Unsur Pengarah;

Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

3. Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri dari :

- a. Pejabat Pemerintah Daerah;
- b. Anggota profesional dan Ahli.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
- b. Pemantauan; dan
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4. Unsur Pelaksana.

- a. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
- b. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari, mempunyai tugas

melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- 1) Pra Bencana;
- 2) Saat Tanggap Darurat dan;
- 3) Pasca Bencana.

c. Unsur pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian;
- 2) Pengkomandoan; dan
- 3) Pelaksana.

d. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas terdiri :

- 1) Kepala Pelaksana;
- 2) Sekretariat Pelaksana;
- 3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 4) Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- 5) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

b) Tugas dan Fungsi

Berikut merupakan Tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas meliputi:

(1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok yaitu

- a) Melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi;
- b) Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja;

- c) Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a) Mengkoordinasikan, pengkomandoan dan melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

(2) Kepala Sekretariat mempunyai tugas pokok :

- 1) Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama;
- 2) Menyusun rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan;
- 3) Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja.

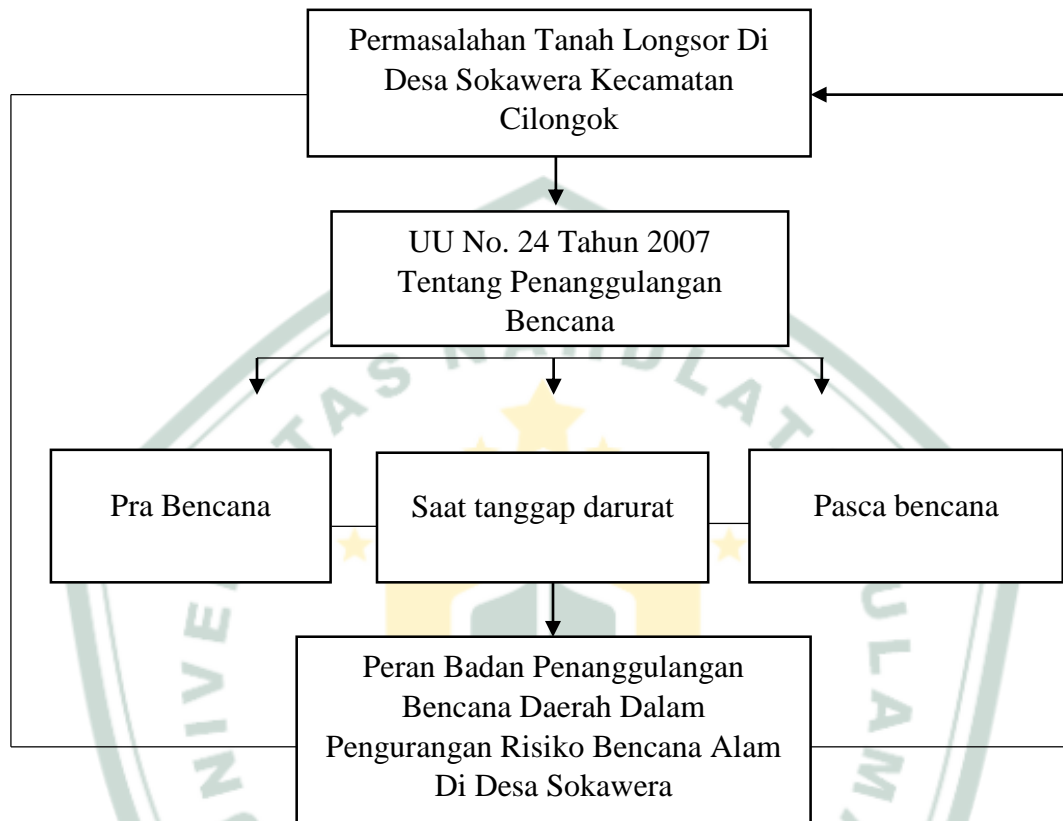
(3) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok:

- 1) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 2) Memantau, mengevaluasi dan menganalisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja;

(4) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok :

- 1) Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja.
 - 2) Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - 3) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas.
- (5) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok:
- 1) Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - 2) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas.
 - 3) Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. sumber: rentra BPBD banyumas pada tanggal 23/05/2023 pukul 16:36 WIB.

C.Kerangka Teori



Gambar 1. Kerangka Teori